

RINGKASAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Lembaga Sewa Beli Sebagai Jenis Perjanjian Baru di Luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ketua Peneliti : Gunawan

Anggota Peneliti : Agung Sujatmiko
Nurwahjuni
Rahmi Jened
L. Budi Kagramanto

Fakultas : Hukum - Unair

Sumber Biaya : DIP Operasional Perawatan dan Fasilitas Universitas Airlangga tahun 1993/1994
S.K. Rektor No. : 3533/PT03.H/N/1993
T a n g g a l : 7 Mei 1993

ISI RINGKASAN :

Di dalam penelitian kali ini dijumpai beberapa permasalahan, yaitu :

1. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para pihak dalam melaksanakan SK. Menkeu No. Kep 38/MK/IV/2/1972 dan SK. Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980 ?
2. Apakah praktek perjanjian sewa beli sesuai dengan pengaturan perjanjian pada umumnya dalam KUH Perdata ?

Sedangkan tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan informasi secara jelas mengenai lembaga sewa beli yang terjadi dalam praktek, karena lembaga ini merupakan jenis perjanjian baru di luar KUH Perdata;
2. Mengetahui apakah lembaga sewa beli ini tidak bertentangan dengan KUH Perdata yang sekarang berlaku dan bagaimana pengaruhnya terhadap dunia usaha saat ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode deduksi. Sedangkan data yang dipergunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari informasi yang berkaitan dengan kegiatan sewa beli dalam praktek. Data tersebut diperoleh melalui wawancara secara bebas dan terbuka

yang berkaitan dengan obyek masalah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan yang berkaitan dengan obyek masalah. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang berhasil dikumpulkan akan dianalisa secara kualitatif. Dalam analisa data ini tidak diperlukan metode perhitungan/statistik.

Ternyata perjanjian sewa beli ini banyak dilakukan dalam praktek dan tidak dijumpai dalam satu pasalpun di KUH Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun demikian praktek yang ada mengenai sewa beli ini tidak bertentangan/sesuai dengan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dimana keberadaan lembaga sewa beli ini diakui adanya serta diperbolehkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu bahwa untuk membuat suatu perjanjian sewa beli harus ada kata sepakat diantara kedua belah pihak, kedua belah pihak harus cakap dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu serta kausa yang diperbolehkan. Oleh karenanya dalam pelaksanaannya perjanjian sewa beli ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 34/KP/II/1980. Jika dalam praktek dapat dilihat bahwa hakekat perjanjian sewa beli adalah jual beli. Hal ini dikarenakan maksud para pihak adalah untuk memperoleh pemilikan suatu barang disatu pihak dan keinginan untuk memperoleh pembayaran atas harga barang dipihak lain dengan sejumlah uang tertentu. Saran yang diberikan dalam penelitian kali ini adalah mengenai peraturan yang mengatur kegiatan sewa beli hendaknya tidak hanya sampai pada peraturan tingkat Menteri saja, tetapi bisa lebih ditingkatkan hingga suatu peraturan yang berbentuk Keppres maupun Undang Undang. Dalam rangka mewujudkan pembentukan KUH Perdata Nasional kiranya dipikirkan juga oleh Pemerintah untuk mengatur masalah sewa beli, mengingat perkembangan dunia usaha dewasa ini cenderung semakin meningkat sesuai kebutuhan masyarakat.